



Judul : Tingkat Kepuasan Terhadap Jokowi Turun : Inflasi dan Minyak Goreng Jadi Faktor Penurunan Kepuasan
Tanggal : Rabu, 27 April 2022
Surat Kabar : Republik
Halaman : 3

Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Jokowi Turun

Inflasi dan minyak goreng jadi faktor penurunan kepuasan.

■ FEBRIANTO ADI SAPUTRO

JAKARTA — Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasil survei tersebut menunjukkan ada tren penurunan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi jika dibandingkan hasil survei pada Januari 2022.

Pada survei terbaru, responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi mencapai 59,9 persen, terdiri atas sangat puas 10,2 persen dan cukup puas 49,7 persen. Angka itu masih lebih tinggi dibandingkan responden yang kurang dan tidak puas sebesar 38,6 persen.

Responden yang kurang puas sebesar 30,5 persen dan tidak puas 8,1 persen. "Jadi, lebih banyak yang puas," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi secara daring, Selasa (26/4).

Namun, persentase kepuasan itu turun 15,4 persen dibandingkan empat bulan lalu. "Kalau kita cek, waktu kita survei di awal Januari 2022, saat itu masyarakat yang puas itu 75,3 persen," ujarnya.

Ia menambahkan, Indikator telah melakukan survei kepuasan terhadap kinerja Jokowi sejak Januari 2015. Angka kepuasan 75,3 persen merupakan yang tertinggi.

"Saat itu inflasi belum terjadi. Minyak goreng masih relatif bisa dipenuhi. Jangan lupa masyarakat saat itu *happy* dengan kinerja pemerintahan menangani kasus pandemi, varian delta. Jadi, coba cek di situ ada kenaikan 13 poin di bulan Juli ya sampai

November, *approval rating*," tuturnya.

Indikator melakukan survei terbaru pada 14-19 April 2022. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung menggunakan metode *multistage random sampling*.

Survei melibatkan 1.220 responden dengan *margin of error* sebesar plus minus 2,9 persen. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, fluktuasi harga menjelang perayaan Lebaran kali ini memang cukup besar. Selain itu, masalah minyak goreng mempertontonkan bahwa berbagai kebijakan yang diambil pemerintah tidak mempan dan mekanisme pasar tidak mudah dikendalikan.

"Rakyat menilai pemerintah tidak efektif menjaga daya beli masyarakat," kata Hendrawan kepada *Republika*.

Politikus PDIP itu memprediksi target inflasi tahun ini maksimal empat persen akan terlewat. Sebab, kenaikan komoditas pangan, energi, bensin, dan pajak penjualan (PPn) memiliki efek inflatoar.

"Pemerintah harus fokus untuk menjaga sisi pasokan agar kenaikan inflasi dapat dikendalikan dengan baik," ungkapnya.

Sinyal Jokowi

Dari sisi politik, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengatakan, Jokowi menunjukkan sinyal ingin mengakhiri polemik terkait penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Sinyal itu terlihat dari pertemuan Jokowi dan Gubernur Jakarta Anies Baswedan di Sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta, Senin (25/4) kemarin. "Kita tahu bagaimana kebisingan tentang Formula E akhir-akhir ini *kan*, Pak Jokowi ingin memberi sinyal untuk mengakhiri semua itu," kata Ahmad kepada *Republika*.

Ahmad menambahkan, kehadiran Jokowi juga menegaskan bahwa menunjukkan bahwa hubungan personal antara Jokowi dan Anies baik-baik saja. Menurutnya, selama ini Presiden Jokowi dipersepsikan menutup hati untuk Anies.

■ ed: ratna puspita



Rakyat menilai pemerintah tidak efektif menjaga daya beli masyarakat.